

Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media Pendidikan Politik bagi Kader Partai dalam Meningkatkan Kesadaran Politik

(Penelitian *Grounded Theory* dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia)¹

Wildan Nurul Fajar²

Abstract

The background of this study is an apprehensive condition of political dynamics recently. It concerns with political activities of politician who do not support people's needs. Politician have to have ability to participate in democratic live, think critically and act consciously in plural society and need empathy for listening and accommodating other needs.

Keywords: *civic education, political education, and political awareness.*

Latar belakang dari pembahasan ini adalah satu kondisi kenegaraan yang penuh pengertian dinamika baru-baru ini. Keprihatinan dengan aktivitas kenegaraan ini dari politisi yang tidak mendukung kebutuhannya orang-orang. Politisi harus mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi pada kehidupan demokratis, memikirkan dengan kritis dan menindak dengan sadar di masyarakat jamak dan empati untuk dengar kebutuhan dan kebutuhan pengakomodasian yang lain.

Kata kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik dan Kesadaran Politik.*

Pendahuluan

Salah satu parameter untuk mengukur kualitas demokrasi adalah sirkulasi kepemimpinan politik yang lancar dengan sokongan kaderisasi kepemimpinan yang melembaga. Kontestasi politik pada sistem demokrasi semestinya dikawal oleh ketersediaan jalur-jalur kaderisasi kepemimpinan yang mampu memunculkan kader-kader pemimpin politik yang handal. Reformasi ditingkat kelembagaan dan prosedural yang telah digulirkan selama hampir satu dasawarsa di negeri ini nyaris tidak disertai dengan perbaikan yang signifikan pada jalur kaderisasi kepemimpinan politik. Publik seolah masih dipaksa untuk memberikan ruang dipanggung politik bagi aktor-aktor lama.

Ironisnya sebagian besar survey yang dilakukan menunjukkan adanya kerinduan publik atas tampilnya figur pemimpin alternatif. Tidak adanya pendidikan politik yang sistematis dan rendahnya penguasaan pengalaman dalam mengatasi masalah sosial dan keterlibatan dalam asosiasi sukarela menjadi kendala utama kaderisasi kepemimpinan politik di Indonesia. Keadaan ini diperparah oleh pola rekrutmen dan nominasi kandidat yang tidak melibatkan anggota partai secara luas. Kandidat muncul tiba-tiba, dan terlahir dari restu elit partai bukan melalui konvensi partai (Suryadi, 2009:205).

Dalam struktur dan sistem politik, organisasi politiklah yang paling bertanggung jawab melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas.

¹ Tulisan ini adalah ringkasan dari tesis penulis pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk Keperluan jurnal ini, naskah disunting ulang seperlunya oleh penulis. Terimakasih di sampaikan kepada penyunting ahli atas komentar-komentar terhadap draf naskah ini.

² Wildan Nurul Fajar, M.Pd adalah Dosen pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Muhammadiyah Purwokerto.

Untuk mempermudah penelitian ini maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. bagaimana proses pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap para kadernya dipahami dalam konteks pendidikan kewarganegaraan?
2. bagaimana realitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap para kadernya dalam meningkatkan kesadaran politik kader partai?
3. bagaimana konstruksi pendidikan politik yang dibutuhkan bagi peningkatan kesadaran politik kader partai?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Secara umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik dan implikasinya terhadap kesadaran politik kader partai. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan teoritik-konseptual mengenai: 1) proses pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik dipahami dalam konteks kewarganegaraan; 2) realitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap para kadernya dalam meningkatkan kesadaran politik kader partai; 3) konstruksi pendidikan politik yang dibutuhkan bagi peningkatan kesadaran politik kader partai.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritik penelitian ini akan menggali, mengkaji, dan mengembangkan model Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pendidikan politik dan implikasinya terhadap peningkatan kesadaran politik.

Manfaat praktis, 1) Memberikan masukan kepada para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi ke arah pengembangan kesadaran politik; 2)

Memberi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan program pendidikan politik; 3) Memberikan gambaran kepada partai politik dalam rangka pengembangan pola kaderisasi yang baik.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini secara umum terbagi empat, yaitu *pertama* Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian *citizenship education* yang merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di luar sekolah yaitu pada partai politik. *Kedua* pendidikan politik, yaitu suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan mengamalkan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Pendidikan politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kadernya. *Ketiga* kesadaran politik, yaitu pandangan yang integral terhadap segala yang dicakup oleh politik, berupa pengetahuan perpolitikan dengan segala tingkatannya, yang memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai persoalan politik ditengah masyarakatnya, menganalisisnya, menempatkan posisi diri darinya, serta mendorong diri untuk bergerak demi perubahan dan perkembangannya

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *grounded theory* yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori *grounded* yang disusun secara induktif tentang suatu fenomena. Melalui metodologi ini tidak hanya dihasilkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep, namun juga dilakukan pengujian sementara terhadap konsep ini. Tujuan metode *grounded theory* adalah menyusun teori yang sesuai dengan dan menjelaskan tentang bidang yang diteliti (Strauss dan Corbin, 2009:12).

Berkaitan dengan penjelasan mengenai konsep pendidikan politik, Ruslan (2000: 87) mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik yang ia mampu dan senang berpartisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Dalam konsep tentang pendidikan politik terkandung esensi utama bahwa pendidikan politik dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku dari insan politik yang memahami tentang kedudukan, peran dan fungsinya dalam kehidupan politik dan bagaimana ia menjalankan aktivitas politiknya berdasarkan pada kedudukan, peran dan fungsi tersebut sehingga nantinya akan memberikan bekal kepada individu tersebut untuk melakukan aktivitas politik yang disertai oleh kesadaran politiknya.

Tinjauan tentang Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terkelola yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (Budiardjo, 2002: 161). Dari pengertian tersebut partai politik hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kedudukan politik dalam memperoleh kekuasaan. Partai politik tak ubahnya sebagai kendaraan yang hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Pencapaian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai posisi

politik bagi pimpinan partainya dan akhirnya akan menjadi keuntungan bagi partai termasuk bagi semua warga partai tersebut.

Seperti halnya organisasi lain yang beroperasi dalam tataran *public-sphere*, partai politik perlu melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik menurut Firmanzah (2008: 69), dapat dibedakan menjadi dua yaitu, pertama peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi.

Tinjauan tentang Konsep Kesadaran Politik

Menurut Surbakti (2010: 184), kesadaran politik dapat diartikan sebagai suatu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Merujuk pada pengertian yang dikemukakan, dapat kita ketahui bahwa seseorang yang memiliki kesadaran politik adalah orang yang mengetahui dan memiliki minat terhadap setiap kejadian atau perubahan yang ada di lingkungan hidupnya. Lebih lanjut diperkirakan bahwa kesadaran politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang. Itu artinya bahwa kesadaran politik sendiri pada intinya dapat dijadikan sebagai salah satu kategori untuk mengukur tingkat partisipasi politik seseorang.

Kesadaran politik memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan konsep kemampuan politik (*efficacy politics*). Menurut Shirozi (2005:47) *political efficacy* merupakan salah satu hasil yang dapat diperoleh dan sosialisasi politik, yaitu "suatu gambaran bahwa seseorang menilai dirinya dapat memengaruhi proses keputusan politik Pemerintah. *Political efficacy*

tujuan bersama bisa dicapai yakni pengembangan individu secara bebas dan penuh sebagai individu yang mandiri dan memiliki tanggungjawab moral. Jika dianalisis dengan cermat, tujuan tersebut berorientasi pada pengembangan kepribadian warganegara yang bertolak dari dan bermuara pada cita-cita, nilai, dan prinsip demokrasi. Hal itu dapat ditangkap dari rumusan tujuan pengembangan warganegara yang mampu berpartisipasi penuh (*fully participating*), berkemampuan (*competent*), dan bertanggungjawab (*responsible*) yakni warganegara yang memiliki komitmen yang bernalar (*reasoned commitment*) terhadap nilai dan prinsip demokrasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai aktor sosial. Yang perlu dilakukan adalah mengembangkan dalam diri individu, pengetahuan dan keterampilan, dan memberikan pengalaman yang mampu mewujudkan sikap yang menjangkau jauh di luar kepentingan sendiri atau kelompok.

Kualitas pribadi yang harus dikembangkan adalah *civic virtue*. Yang dimaksud dengan *civic virtue* adalah kemauan dari warganegara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic virtue* ini memiliki dua unsur, yaitu *civic dispositions* dan *civic commitments*. Pengembangan dimensi *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan *civic participation* yang memang merupakan tujuan akhir dari Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi *civic participation* ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperanserta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperanserta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan kemandirian dari warganegara, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peranserta aktif warganegara. Untuk dapat berperan secara aktif tersebut pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa aktual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warganegara.

Jika dilihat dari sasaran dikembangkannya *civic virtue* dan *civic participation*, dapat disimpulkan bahwa salah satu dimensi dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengembangan watak dan karakter warga negara yang peka, tanggap, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka diperlukan sarana-sarana yang dapat digunakan untuk mawadahi partisipasi tersebut. Partai politik merupakan salah satu wahana yang dibangun bagi warga negara untuk dapat mengembangkan dimensi *civic participation*. Dimensi ini dikembangkan untuk mencapai tujuan yakni, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperanserta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperanserta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari warganegara, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peranserta aktif warganegara. Dari tujuan tersebut terlihat adanya hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan partai politik. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai kajian di partai politik. Karena saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah lebih luas dari pada embrionya. Kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan, dan aktivitas sosial-kultural Pendidikan Kewarganegaraan yang tercakup didalamnya memberi ciri multifasetisitas/ multidimensionalitas. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan politik.

Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Untuk menciptakan pemerintahan yang mayoritas, maka diperlukan partai-partai yang dapat digunakan sebagai

proach, commitment approach, dan union approach. Hal lainnya yang penting untuk pelaksanaan pelatihan adalah materi-materi yang diadopsi dari materi yang selama ini diberikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan seperti materi perlindungan dan penegakan HAM, materi demokrasi, materi konstitusi, materi kedaulatan rakyat, materi tentang hukum, materi hak dan kewajiban warganegara. Penetapan metode pelatihan menjadi hal yang tidak boleh dilupakan dalam suatu pelatihan. Ada beberapa alternatif metode yang bisa di pakai dalam pelatihan kader partai. Metode-metode tersebut dapat meliputi metode yang memang diperuntukan untuk kegiatan pelatihan maupun metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran disekolah terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tetapi bisa juga diadopsi dan diaplikasikan dalam pelatihan kader partai. Metode-metode tersebut diantaranya metode pembelajaran *project citizen*, metode belajar berdasarkan masalah (BBM), metode *brainstorming*, dan metode kooperatif. Sementara itu media yang dapat digunakan dalam pelatihan kader partai meliputi: OHP, Audio Visual, peta, kliping, artikel-artikel internet, dan lain-lain. Proses akhir yang tak kalah penting dalam suatu pelatihan adalah bentuk evaluasi yang digunakan. Evaluasi atau penilaian dalam proses pelatihan diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator hasil latihan dengan berpedoman pada Penilaian Berbasis Kelas. Proses Penilaian tersebut meliputi penilaian tertulis (*pencil and paper test*), penilaian berdasarkan perbuatan (*performance based assessment*), penugasan (*project*), produk (*product*), dan portofolio (*portofolio*). Penilaian tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu penilaian kegiatan dan kemajuan belajar peserta pelatihan adalah upaya pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar peserta yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta pelatihan, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan pembelajaran dan penilaian kegiatan yang dilakukan dengan cara evaluasi multi sistem, serta terus menerus dan berkesinambungan.

A. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa butir kesimpulan, yaitu:

1. Partai politik memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui partai politik para pemimpin dan wakil rakyat di negara kita terpilih. Namun peran penting tersebut tidak disertai oleh pelaksanaan fungsi partai politik sebagai *Instrumen of Political Education* dengan baik dan benar terutama terhadap kadernya. Hal ini karena pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik sering terkendala dengan masalah dana. Dengan adanya hambatan tersebut, maka persepsi tentang bentuk pendidikan politik itu sendiri harus dirubah. Pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dapat dilakukan melalui bentuk formal tetapi juga dalam bentuk non formal.
2. Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana pendidikan. Dalam arti pengetahuan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki *body of knowledge* (kestrukturan pengetahuan). Sebagai proses pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan berusaha untuk mengembangkan *political awareness, political behavior, dan political attitude* yang dikemas didalam satu proses pendidikan yang kita sering sebut *civic competence*. Jembatan antara partai politik dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik warganegara agar memiliki kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). Memang partai politik tidak menjalankan Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti formal, tetapi dia dapat menjalankan Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti non formal. Partai politik dapat berperan seperti halnya Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yaitu sebagai sumber-sumber inspirasi akademik, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana perubahan perilaku, dan sebagai sarana habituasi untuk

- Noor, F, 2009, *Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi peran Partai dan Gejala Pragmatisme*, Dalam Jurnal Penelitian Politik. Vol. 6 no. 1. Jakarta: LIPI Press
- Ruslan, U. AM, 2000, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia
- Sapriya, 2006, *Perspektif Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Disertasi SPs UPI: tidak diterbitkan.
- Strauss, A. & Corbin, J, 2009, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Terjemahan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien dari judul *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, Bima Aria, 2010, *Anti Partai*, Jakarta: Gramata Publishing
- Surbakti, R, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo
- Suryadi, K, 2009, "*Balihocracy*" *Komunikasi Politik dan Orientasi Pemasaran dalam Pemilu*, Bandung: Pusat Studi Agama dan Pembangunan, Yayasan Indonesia Gemilang.
- _____, 2008, *Partai Politik, Civic Literacy dan Mimpi Kemakmuran Rakyat*" dalam Akta Civicus Vol 1 Nomor 2 , Oktober 2007
- Winataputra, U.S, 2001, *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS*, Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan.
- Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D, 2007, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.